

**PENERAPAN APLIKASI MONITORING LELANG (MONPELA) DI BIRO LAYANAN
PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (LPPBMN) KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN**

Geraldine Jillyan Panie

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
geraldine.18074@mhs.unesa.ac.id

Suci Megawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
sucimegawati@unesa.ac.id

Abstrak

Di Indonesia sudah terjadi banyak perubahan pada sektor administrasi publik yang mana ini akan mempermudah segala bidang kehidupan khususnya bidang budaya, ekonomi dan sosial dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Tujuan dari penelitian ini menganalisis website Monitoring Lelang di dalam upayamewujudkan reformasi birokrasi melalui sebuah inovasi di Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah penelitian deskriptif. Subjek penelitian adalah Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan dan sekaligus menjadi informan utama karena di dalamnya terdapat agen perubahan reformasi birokrasi, dimana agen perubahan inilah yang bertanggung jawab dalam proses pengembangan website Monpela. Teknik pengambilan data menggunakan teknik *purposive sampling* dan dianalisis melalui tahapan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian ini dilandasi oleh teori menurut Cook, Matthew dan Irwin yang terdiri dari 5 aspek yaitu 1) kepemimpinan, dalam pelaksanaan program aplikasi Monpela Pemimpin memiliki kendali atas suksesnya inovasi sampai pada tahap implementasi 2) manajemen/organisasi, dengan aplikasi Monpela tersedia informasi perencanaan tender kegiatan prioritas dengan variabel yang dapat mengoptimalkan kinerja dan pelaksanaan pekerjaan bisa tepat waktu, 3) manajemen risiko, dalam pelaksanaan monpela masih menemukan kendala terkait anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia belum optimal dan cenderung bagian tertentu meminta tender didahulukan sehingga perlu adanya kesiapan yang lebih dalam pelaksanaan Monpela, 4) kemampuan sumber daya manusia, dalam pelaksanaan Monpela ini telah dilakukan bimbingan dan teknologi dan sosialisasi serta melakukan kajian yang mendalam untuk menyiapkan sumber daya manusia agar mampu menjalankan program sesuai yang direncanakan dan 5) pemanfaatan teknologi membantu kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat.

Kata Kunci: reformasi birokrasi, agen perubahan, monitoring lelang.

Abstract

In Indonesia, there have been many changes in the public administration sector which will facilitate all areas of life, especially the cultural, economic and social fields in realizing bureaucratic reform. The purpose of this study is to analyze the Auction Monitoring website in an effort to realize bureaucratic reform through an innovation at the LPPBMN Bureau of the Ministry of Transportation. The research method used in writing this article is descriptive research. The research subject is the LPPBMN Bureau of the Ministry of Transportation and at the same time becomes the main informant because it contains agents of change for bureaucratic reform, where these change agents are responsible for the process of developing the Monpela website. The data collection technique used purposive sampling technique and analyzed through the stages of observation, interviews, documentation and literature study. The results of this study are based on a theory according to Cook, Matthew and Irwin which consists of 5 aspects, namely 1) leadership, in the implementation of the Monpela application program Leaders have control over the success of innovation until the implementation stage 2) management/organization, with the Monpela application there is information on tender planning priority activities with variables that can optimize performance and execution of work can be on time, 3) risk management, in the implementation of monpela still encounters constraints related to budget and limited human resources that are not optimal and tend to be certain parts request tendering precedence so there needs to be more readiness in implementation Monpela, 4) the ability of human resources, in the implementation of this Monpela guidance and

technology and socialization have been carried out as well as conducting an in-depth study to prepare human resources to be able to run the program as planned and 5) the use of technology to help employee performance in providing accountable and transparent services to the community.

Keywords: bureaucratic reform, agent of change, overseeing auctions.

PENDAHULUAN

Pada tahun 1998 reformasi di Indonesia telah berjaya dengan adanya tuntutan masyarakat yang kuat untuk mengubah tatanan pemerintah Indonesia. Dilihat dari dinamika penyelenggaraan negara yang terjadi mendasari keinginan sebagian orang di bidang politik, hukum, ekonomi dan birokrasi pemerintahan yang efektif. Menurut Max Weber dalam Pratiwi dkk., (2022) birokrasi adalah sistem manajemen sehari-hari yang dijalankan secara khusus oleh orang berbakat di bidangnya berdasarkan aturan tertulis dan dengan kesatuan. Namun Jazuli Ahmed (2021) mengatakan bahwa birokrasi disusun untuk upaya pengelolaan berbagai sumber daya manusia agar dapat didistribusikan secara adil kepada semua masyarakat. Tapi seringkali birokrat dianggap hierarki yang panjang karena prosedur yang rumit dan kurang efisiensi. Jadi jika bisa disimpulkan bahwa birokrasi berkaitan erat dengan sistem organisasi atau lembaga karena fungsi kekuasaan legitimasi, fungsi manajemen ekonomi dan juga fungsi pelaksanaan personel serta memiliki tujuan khusus.

Reformasi birokrasi saat ini kurang lebih sudah berjalan 15 tahun, berbagai upaya dan inovasi telah dilakukan untuk menerapkan tata kelola yang baik. Birokrasi juga diterapkan untuk membentuk serangkaian inisiatif untuk memenuhi tuntutan masyarakat ke arah lebih baik. Konsep dan prinsip tata pemerintahan yang baik telah dimulai sebagai parameter untuk mengevaluasi kemajuan kinerja sumber daya manusia, mengkoordinasikan dan mengontrol perilaku masyarakat agar lebih tertib. Gelombang pertama birokrasi ini ditandai dengan adanya tuntutan publik dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi tonggak awal dimulainya era reformasi birokrasi. Keberhasilan reformasi birokrasi tergantung pada komitmen dan pemimpinnya, tanpa komitmen dan kepemimpinan nasional pelaksanaan reformasi birokrasi akan gagal. Hal ini dikarenakan kurangnya komitmen dalam implementasi dan juga kepemimpinan nasional yang kurang tepat. Biasanya, kebijakan birokrasi saat ini sebenarnya adalah birokrasi yang bersih dan bertanggung jawab, efektif dan efisien serta birokrasi yang memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Ketiga kunci tersebut ialah untuk mencapai reformasi birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi menjelaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan upaya memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penataan, percepatan, dan inovasi di berbagai area. Selain itu, dalam Peraturan Presiden Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dijelaskan bahwa tujuan dari Reformasi Birokrasi

Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang baik, profesional dan memiliki integritas yang tinggi. Tidak hanya itu saja, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bahwa reformasi birokrasi fokus pada reformasi struktur yang sederhana, mengubah pola pikir pegawai, tanggap dalam memberikan pelayanan, perizinan dan efisiensi otoritas pemerintah.

Dalam penelitian Erlina (2016) Reformasi birokrasi sangatlah penting dilakukan karena secara sosiologis birokrasi menyebabkan banyak problematika yang disebabkan oleh kompleksitas proses birokrasi yang menunda penyelesaian tugas pokok dan fungsi birokrasi itu sendiri apalagi prosesnya yang membebani APBN. Hal ini didukung oleh databoks (2022) oleh Cindy Mutia yang mana menjelaskan pemerintahan Indonesia khususnya Komisi Pemberantasan korupsi tercatat telah menangani tindak pidana sejak 2004 hingga 2021 sebanyak 1.194 kasus. Sedangkan menurut Haning dalam Haning Thahir (2018) berpendapat bahwa Amerika Serikat menyadari pentingnya melakukan perubahan pada birokrasi negara sebab menyadari bahwa revolusi industri saat itu dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat. Tidak hanya itu saja, ketika sejumlah imigran datang untuk bekerja maka akan berdampak negatif pada masyarakat dan birokrat akan mengembangkan kebijakan publik yang lebih fokus.

Sehingga dari pendapat diatas dapat ditarik benang merah bahwa reformasi birokrasi itu penting ialah untuk mentransformasikan nilai-nilai baru sebagai prasyarat untuk menciptakan kepuasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dari segala kalangan, sehingga birokrasi pemerintah berperan untuk mengontrol pemerintahan negara dan pelayanan publik yang berkualitas tinggi agar dapat mencapai pemerintahan yang baik. Di Indonesia sudah terjadi banyak perubahan pada sektor administrasi publik. Jika dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu ini akan mempermudah segala bidang kehidupan khususnya bidang budaya, ekonomi dan sosial. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial ekonomi telah membawa perubahan kebutuhan masyarakat, mendorong pemerintah untuk menyediakan berbagai fasilitas untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, agar pemerintah dapat memenuhi tuntutan masyarakat maka harus memberikan pelayanan yang cepat, mudah, efektif dan efisien dengan didukung oleh SDM aparatur yang paham akan teknologi.

Menurut Wardani dalam penelitian Yasa dkk, (2021) menyatakan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi tidak otomatis menghasilkan perangkat SDM yang unggul dalam pengetahuan dan inovasi, sebab harus mengikuti perkembangan zaman dan pemerintahan yang mendukung adanya kemajuan teknologi. Pada penelitian Dodi dkk, (2020) mengatakan bahwa dalam menerapkan

Smart ASN di era digital saat ini perlu mengoptimalkan generasi muda milenial di lingkungan pemerintahan sebagai upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Wastuhana & Werdiningsih, (2021) menggunakan teknologi informasi sangat diperlukan dalam mengembangkan inovasi dalam pelayanan publik sebagai pengembangan birokrasi, sebab selain di Kota Semarang dan beberapa daerah lainnya juga menerapkan inovasi teknologi informasi untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Maka dari itu, pemerintah berupaya fokus pada masalah tata kelola yang berprioritas para perbaikan yang disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan sumber daya manusia dengan melibatkan dan memberdayakan sumber daya manusia.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintahan, menjelaskan harapan pemerintah terhadap agen perubahan birokrasi berperan dalam mendorong perubahan untuk seluruh elemen pemerintahan antara lain tingkat Kementerian, Lembaga, Badan hingga lingkup terkecil pemerintahan, yang mana sikap menjadi panutan (*role model*) pegawai lain, memiliki integritas dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai organisasi dan mendukung keberhasilan

menjunjung tinggi nilai-nilai dan berperilaku positif, komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, dan ikut berperan di dalamnya sehingga bisa mewujudkan pemerintahan yang baik. Selain itu salah satu pembaharuan untuk menunjang reformasi birokrasi ialah agen perubahan memanfaatkan teknologi informasi. Upaya ini bisa digunakan sebagai evaluasi efektif untuk memperbaiki birokrasi pemerintah dan mengontrol pribadi kinerja pegawai agar membawa efek yang baik pada birokrasi Indonesia. Maka, agen perubahan Kementerian Perhubungan berupaya mewujudkan proyek yang ada disini” (Rabu, 22 Februari 2022). Namun, dalam mendukung reformasi birokrasi sejauh ini belum ada indikator yang baku perihal penerapan aplikasi Monpela dalam mendukung adaptasi inovasi teknologi untuk mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia.

Dari uraian diatas, peneliti ingin mengetahui penerapan aplikasi Monpela di Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan. Peneliti menggunakan landasan teori yang dikemukakan oleh menurut Cook, Matthew dan Irwin dalam Salsabila dkk, (2018) dimana terdapat lima aspek faktor keberhasilan inovasi antara lain kepemimpinan, manajemen organisasi, manajemen resiko, kemampuan SDM dan teknologi yang mana lima aspek tersebut harus dimiliki oleh agen perubahan untuk mewujudkan reformasi birokrasi di Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan

reformasi birokrasi. Maka, dengan adanya peran dari agen perubahan yang mana perlu dilatih untuk mendukung anggota organisasi saat mengalami kesulitan ketika beradaptasi dengan perubahan dalam merancang keputusan. Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, yang menyebutkan bahwa salah satu tugas, pokok dan fungsi Biro LPBBMN adalah mengelola proses pengadaan barang/jasa mulai dari proses perencanaan sampai pengelolaan aset. Berdasarkan hal tersebut diperlukannya reformasi birokrasi yang mengacu pada inovasi kebijakan yang diharapkan mampu memberikan manfaat dalam proses pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien dengan membentuk agen perubahan.

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 105 Tahun 2022 Tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2022, agen perubahan mempunyai peran dalam mendorong dan menggerakkan pegawai agar berpartisipasi mewujudkan perubahan ke arah unit kerja yang lebih baik. Maka dengan peran ini diharapkan pemerintah bisa mewujudkan kearah birokrasi yang ideal, didukung aparatur pemerintah yang

reformasi birokrasi dengan berinovasi membuat sebuah aplikasi bernama Monitoring Lelang (Monpela).

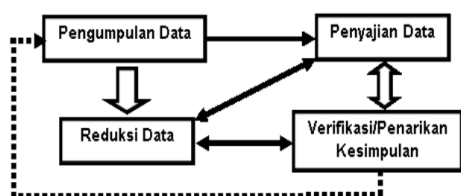
Aplikasi Monitoring Lelang diluncurkan oleh Kementerian Perhubungan bertujuan untuk media monitoring perkembangan secara strategis Kementerian Perhubungan berbasis web untuk memantau pengelolaan anggaran dan proyek pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Bapak Budi Karya Sumadi selaku Kementerian Perhubungan mengatakan “Dengan adanya aplikasi ini menjadi real time, bisa komunikasi langsung sebagai suatu basis daripada pengelolaan anggaran dan

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah penelitian kualitatif dengan penjelasan secara deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah dihimpun oleh peneliti dengan memberikan perhatian sebanyak mungkin aspek terhadap suatu yang tengah diteliti, sehingga didapatkan gambaran secara menyeluruh tentang keadaan sebenarnya (Akhmad dkk, 2015). Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu informan yang sudah ditentukan terkait Monpela yaitu Sekretaris Jenderal yang menaungi Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan dan sekaligus agen perubahan. Hal ini karena Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan di dalamnya terdapat agen perubahan reformasi birokrasi, dimana agen perubahan inilah yang bertanggung jawab dalam proses

pengembangan website Monpela. Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan tentang proses monitoring lelang melalui pengembangan hingga penerapan website Monpela dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang dikembangkan oleh Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan dengan menggunakan teori faktor keberhasilan inovasi menurut Cook, Matthew dan Irwin dalam Salsabila dkk, (2018) dengan lima indikator, antara lain:

1. Kepemimpinan
2. Manajemen/Organisasi
3. Manajemen Resiko
4. Kemampuan Sumber Daya Manusia



Grafik 1. Alur Penelitian
Sumber: Sugiyono, 2018

5. Teknologi

Berikut ini alur penelitian menggunakan metode deskriptif:

Pengumpulan data beberapa teknik yaitu wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan proses reduksi data untuk memilah data yang telah diperoleh, membuat fokus dan membuang data yang tidak penting. Setelah dilakukan reduksi data berikutnya data disajikan guna menjawab permasalahan yang tengah dikaji dan ditarik sebuah benang merah atau kesimpulan. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan pemodelan yang dikemukakan oleh Miles Huberman dalam Sugiyono (2018) menyatakan bahwa analisis data harus dilakukan secara interaktif terus menerus sampai data lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Monitoring Lelang di Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan ini diresmikan pada bulan Februari tahun 2022, yang mana sebagai upaya mewujudkan reformasi birokrasi. Hal ini merupakan salah satu dorongan positif Kementerian Perhubungan dalam membentuk pemerintahan yang lebih baik. Monitoring Lelang merupakan sebuah website aplikasi berbasis teknologi yang dibuat dengan alasan karena terjadinya keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh lelang yang terlambat, belum tersedianya sistem informasi perencanaan lelang

atau tender secara elektronik, dan adanya tender yang terlambat sehingga menumpuk setiap bulannya. Menurut Sumarto dalam Yusriadi (2018) mengatakan bahwa salah satu bentuk kebijakan negara ialah berupa pengadaan barang dan jasa yang diakses secara online sebagai upaya perbaikan pemerintahan yang dahulunya rentan dengan korupsi. Maka dengan adanya hal ini diharapkan adanya pondasi yang kuat dalam mewujudkan reformasi birokrasi sehingga Kementerian Perhubungan membentuk agen perubahan dalam proses pengembangan website sistem monitoring lelang. Agen perubahan di Kementerian Perhubungan terdiri dari 85 orang dari berbagai unit kerja antara lain:

**Tabel 1. Daftar Unit Kerja Agen Perubahan
Kementerian Perhubungan**

1	Sekretaris Jenderal	3 Orang
2	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	23 Orang
3	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	25 Orang
4	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	16 Orang
5	Direktorat Jenderal Perkerataapian	5 Orang
6	Inspektorat Jenderal	2 Orang
7	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	8 Orang
8	Badan Kebijakan Transportasi	2 Orang
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	1 Orang

Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 105 Tahun 2022

Maka dari tabel di atas dijelaskan bahwa salah satu unit kerja agen perubahan Kementerian Perhubungan yaitu Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan yang dimana berada unit kerja tersebut berada di bawah naungan Sekretaris Jenderal. Hal ini diperkuat dengan (hasil wawancara, Bulan April) dengan Ibu Intan selaku Kepala Sub Bagian Pengelolaan BMN mengatakan *agent of change* atau agen perubahan ini memiliki peran penting sebagai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan roda penggerak perubahan terutama perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) untuk mewujudkan kinerja birokrasi dan peningkatan integritas yang tinggi, sehingga

harapannya pegawai bisa mengubah tata kelola dan sistem pemerintah menjadi lebih baik.

Agen perubahan di awal tahun 2022 ini memiliki proyek pembangunan melalui sistem teknologi yang terintegrasi dengan aplikasi pengajuan tender (Silaju) yang mana bertujuan dalam peningkatan tata kelola tender yang efektif dan efisien, proyek tersebut adalah aplikasi berbasis website namanya Monitoring Lelang atau yang biasanya disebut Monpela. Aplikasi Monpela ini menyajikan perencanaan tender atau lelang paket prioritas pada tiap bulannya berdasarkan jumlah anggaran, jangka waktu pelaksanaan, kegiatan strategis dan menyentuh ke masyarakat yang diambil dari aplikasi SIRUP. Menurut Bapak Ulan selaku koordinator kelompok Pengelolaan Barang Milik Negara tujuan dari Monpela antara lain 1) tersedianya informasi perencanaan tender kegiatan prioritas sesuai dengan variabel, 2) terencananya tender kegiatan prioritas agar tidak terjadi penumpukan pada bulan tertentu, 3) meringankan beban kerja POKJA sehingga dapat mengoptimalkan kinerja pegawai, 4) dapat memonitor kegiatan yang sudah berjalan secara otomatis, 4) pelaksanaan pekerjaan tepat waktu dan meningkatkan daya serap, dan 5) SILAJU terintegrasi dengan aplikasi Monpela sehingga pelaksanaan tender sesuai dengan rencana.

“Sedangkan manfaat dari Monpela ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagi Biro LPPBMN, unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dan masyarakat. Bagi Biro LPPBMN manfaatnya antara lain a) mendorong adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja, b) meningkatkan kuantitas dan kualitas dan kualitas layanan, c) adanya sistem perencanaan, monitoring dan informasi data yang tepat, d) mengurangi beban kerja SDM, dan e) memberikan kemudahan dalam memonitor dan melaksanakan perencanaan kegiatan tender. (hasil wawancara dengan Bapak Anies, Februari 2022)

Berdasarkan informasi dan data dilapangan website Monitoring Lelang di Biro LPPBMN Kementerian perhubungan dapat dianalisis menggunakan teori Cook, Matther, dan Irwin, analisis dari indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Kepemimpinan

Di Kementerian Perhubungan ini dipimpin oleh seorang menteri yang mana harus memiliki rasa tanggung jawab, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga dalam mewujudkan reformasi birokrasi seorang pemimpin memiliki dan mampu berinovasi untuk melakukan suatu perubahan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan, efektif dan efisien. Berdasarkan pengamatan dan wawancara oleh peneliti, pimpinan di Kementerian Perhubungan telah memenuhi syarat kepemimpinan yang mana sudah melaksanakan tugas, peran dan tanggung jawabnya di masing-masing bidang dan jabatannya sebagai pemimpin di instansi. Dalam pelaksanaan proyek pembangunan di Kementerian Perhubungan setiap pemimpin memiliki peran penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi, terutama Biro LPPBMN yang memiliki peran dalam pengelolaan barang dan jasa milik negara. Dalam hal ini Biro LPPBMN membentuk Agen Perubahan dalam menjalankan inovasi yaitu Monpela yang dipimpin oleh Bapak Heri Junaedi selaku Plt Kepala Sub Bagian Strategi Pengadaan mengatakan sebagai seorang pemimpin untuk melaksanakan Monpela ini tentunya memiliki strategi untuk mencapai target yang diinginkan.

“Bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan manfaat Monpela ini memberikan layanan monitoring tender melalui aplikasi berbasis teknologi informasi secara terukur, efektif, dan efisien sehingga pelaksanaan kerja bisa selesai tepat waktu dan dapat meningkatkan penyerapan anggaran. Dan bagi masyarakat dengan adanya Monpela berbasis aplikasi ini untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa”. (hasil wawancara dengan Bapak Anies, Februari 2022)

Sebab menurut beliau kepemimpinan ini belum terlaksana dengan optimal, sehingga strategi yang dilakukan ialah dengan membentuk tim efektif yang mendukung aksi perubahan yaitu agen perubahan, menyusun variabel yang digunakan dalam proses perencanaan tender, penyempurnaan aplikasi Monpela hingga monitoring implementasinya. Selain itu dalam hal ini didukung oleh penelitian Parjaman dalam Yasa, Suswanta dll, 2021) mengatakatan kepemimpinan sangatlah penting dalam birokrasi sebab sebagai inspirator dan motivator untuk membawa perubahan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Sehingga agen perubahan dalam melaksanakan reformasi birokrasi ini juga bekerjasama dengan bidang-bidang lain dan tentunya juga melibatkan masyarakat sehingga

merasakan manfaatnya dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pembangunan aplikasi Monpela ini terintegrasi dengan aplikasi Silaju sehingga Biro LPPBMN mensosialisasikannya kepada Dirjen, Biro Keuangan, Biro Perencanaan, Sub Sektor, Satker, Pustikom, dan pokja hal ini upaya yang dilakukan pemimpin dalam meningkatkan kualitas kerja layanan pengadaan barang dan jasa dan mendukung aksi perubahan perubahan tender sesuai otoritas. Sehingga peran pemimpin ini melekat erat sebagai *role model* untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan berkaitan langsung dengan keberlangsungan pengembangan aplikasi Monpela sebagai informasi perencanaan tender kegiatan prioritas sesuai dengan variabel yang ditentukan.

Hasil dengan adanya penerapan kepemimpinan ini pemimpin memiliki komitmen yang dibuktikan dengan penerapan Monpela memberikan transparansi dalam laporan rencana kegiatan lelang yang saat ini masih terlaksana dengan baik sehingga layanan yang diberikan dapat terukur, efektif dan efisien.

2. Manajemen/Organisasi

Faktor keberhasilan inovasi kedua ialah manajemen/organisasi yang mana berkaitan dengan strategi, visi dan misi dalam instansi, dan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zulfikar selaku Koordinator kelompok Layanan Pengadaan menyatakan bahwa dalam mewujudkan reformasi birokrasi pegawai Biro LPPBMN sudah melakukan sesuai dengan visi dan misi yang dilakukan, serta salah satu upaya yang dilakukan ialah membuat aplikasi Monpela. Hal ini didukung oleh penelitian Yusriadi (2018) mengatakan bahwa dengan adanya konsep manajemen pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan instansi pemerintah membantu pemanfaatan teknologi dan penyampaian informasi yang tepat, cepat dan akurat.

Maka, Kementerian Perhubungan memiliki visi dan misi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan adanya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah kepada negara dengan menyusun strategi dengan menggunakan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Wujud dari strategi tersebut ialah dengan adanya aplikasi Monpela ini dilaksanakan di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk memberikan layanan yang terukur, efektif dan efisien. Aplikasi Monpela ini diterapkan oleh Biro LPPBMN bertujuan agar tersedianya informasi perencanaan tender kegiatan prioritas sesuai dengan variabel

sehingga dapat mengoptimalkan kinerja dan pelaksanaan pekerjaan bisa tepat waktu. Selain itu strategi yang dilakukan ialah dengan bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk mendukung aksi perubahan terkait memberikan informasi data, link dan tautan dalam pelaksanaan Monpela.



Gambar 1. Alur Silaju Dengan Monpela

Sumber: Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan

Gambar di atas, merupakan gambaran terkait posisi monpela dalam hal proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan ini dapat dikatakan bahwa Simonpela adalah sebuah sistim informasi yang menyajikan seluruh kegiatan yang akan dilelangkan pada tahun 2022 yang telah diinput oleh Satker kedalam aplikasi sistim informasi rencana umum pengadaan (Sirup). Cara kerja Sistim Informasi Simonpela adalah mengambil secara otomatis seluruh kegiatan didalam sirup dan diolah secara otomatis berdasarkan 4 variabel tersebut, serta secara otomatis pula menyajikan data perencanaan tender sesuai dengan variable-variabel yang ditentukan. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa simonpela dapat menyajikan kegiatan pada tahun 2022 yang masuk pada rencana lelang prioritas mulai bulan November 2021, Desember 2021, Januari 2022, Februari 2022 dan seterusnya berdasarkan prioritas tender. Dengan sistim informasi ini diharapkan kegiatan prioritas mendapatkan pelayanan tender terlebih dahulu dibandingkan dengan kegiatan non prioritas, dan dapat menghindari punumpukan kegiatan tender di bulan januari-maret 2022 serta dapat memaksimalkan sumber daya manusia (pokja) dalam melakukan kegiatan tender dngan *outcome* yang diharapkan adalah kegiatan tender menjadi terencana, teratur, akuntabel dan *GCG (Good and Clean Governance)*.

3. Manajemen Resiko

(Hasil wawancara, Mei) dengan Ibu Tika selaku Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Umum

mengatakan manajemen risiko ini penting untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program untuk mencapai tujuan yang yaitu reformasi birokrasi. Monpela ini memiliki potensi yang bagus untuk Biro LPPBMN sendiri dapat mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, adanya sistem perencanaan dan monitoring dan informasi data yang tepat dan akurat, mengurangi beban kerja SDM, dan juga memberikan kemudahan dalam memonitor dan melaksanakan perencanaan kegiatan tender. Hal ini didukung oleh penelitian Sartika dan Lutfi (2020) mengatakan bahwa manajemen risiko penting dilakukan untuk dokumentasi dan analisa agar mengetahui resiko dan peluang dalam suatu kebijakan yang ditetapkan.

Maka unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan memberikan layanan secara terukur, efektif dan efisien yang mana memonitor tender melalui aplikasi berbasis teknologi dan informasi secara efektif dan efisien sehingga pelaksanaan pekerjaan bisa tepat waktu dan meningkatkan penyerapan anggaran. Serta bagi masyarakat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Namun dalam pelaksanaan Monpela masih menemukan kendala terkait anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia yang belum optimal dan cenderung bagian tertentu meminta tender didahulukan sehingga perlu adanya kesiapan yang lebih dalam pelaksanaan Monpela. Maka agar tidak terjadi hal yang diinginkan Biro LPPBMN menggandeng agen perubahan untuk memenuhi dokumen siap tender, meminta hasil review dari Pustikom dan juga meminta kesediaan LKPP dalam membagi data yang dibutuhkan. Sehingga dalam mewujudkan reformasi birokrasi ini agen perubahan Kementerian Perhubungan juga memiliki peran dalam mengurangi resiko yang terjadi saat pelaksanaan program, yaitu dengan mengajukan peraturan terkait perencanaan tender, melakukan sosialisasi dan rapat intensif aplikasi Monpela, dan melakukan koordinasi dengan Pustikom terkait review dan LKPP terkait Sirup, sehingga bisa mewujudkan tata kelola yang baik seperti tujuan yang diinginkan.

4. Kemampuan Sumber Daya Manusia

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi tentu perlu adanya kemampuan sumber daya manusia untuk para agen perubahan bisa melaksanakan program sistem perencanaan dan Monpela yang efektif dan efisien.

5. Teknologi

memperbaiki tata kelola pemerintahan. Maka dalam pelaksanaan Monpela ini stakeholder atau agen perubahan mengikuti pelatihan agar bisa menjalankan program dengan baik. Menurut Bapak Eri selaku Koordinator kelompok Rencana Program dan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Monpela ini agen perubahan melakukan bimbingan dan teknologi dan sosialisasi serta melakukan studi kajian yang mendalam untuk menyiapkan sumber daya manusia agar mampu menjalankan program sesuai yang direncanakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Megawati Suci dll (2021) dengan adanya kegiatan pendampingan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan pemahaman pegawai dalam mengelola platform yang digunakan sehingga dapat dikembangkan secara optimal oleh perangkat desa dan masyarakat.



Gambar 2. Pelatihan Monitoring
Sumber: Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa kemampuan sumber daya manusia di unit kerja Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan ini dalam penerapan mopela belum optimal hal ini dibuktikan dengan adanya rapat evaluasi yang dilakukan oleh stakeholder. Sehingga agen perubahan memiliki strategi yang dilakukan agen perubahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi ialah dengan cara melakukan pelatihan terkait inovasi transformasi digitalisasi dengan berkoordinasi dengan LKPP dan Pustikom diikuti oleh seluruh stakeholder khususnya age perubahan itu sendiri. Output yang dihasilkan dari pelatihan ini ialah meningkatkan kinerja pelayanan pengadaan yang terukur dan terorganisasi, sehingga

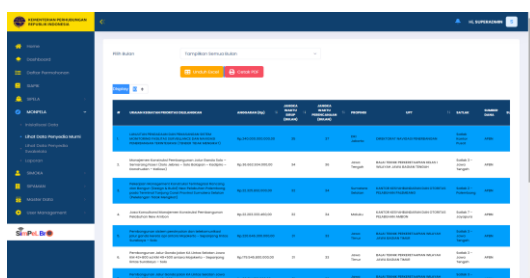
Faktor yang menunjang reformasi birokrasi salah satunya ialah teknologi yang mana digunakan sebagai sarana penyampaian informasi yang lebih akurat sehingga dibuatlah aplikasi Monpela berbasis website yang mana target penggunaanya Direktur Jenderal,

Biro Keuangan, Biro Perencanaan, Sub Sektor, Pt Bagian Layanan Pengadaan, Satuan Kerja, Pustikom, Pokja dan LKPP. Maka alur pelayanan aplikasi Monpela sebagai berikut:



Gambar 3. Alur Pelayanan Monpela Saat Ini
Sumber: Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa pemanfaatan teknologi ini membantu kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Sehingga dalam menunjang keberlangsungan program Monpela ini memerlukan perangkat yang memadai seperti software dan internet agar bisa digunakan saat input data monitoring lelang sesuai dengan target yang ditetapkan, sebab dalam aplikasi Monpela ini masih belum tersedianya sistem informasi perencanaan tender berdasarkan variabel penting seperti besaran jumlah anggaran, waktu pelaksanaan pekerjaan, proyek strategi nasional dan kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat.



Gambar 4. Tampilan Data Rencana Tender
Sumber: Aplikasi Monpela

Seperti pada tampilan di atas dengan aplikasi Monpela ini bisa menyusun data rencana tender sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Sehingga agen perubahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada harapannya mudah beradaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan instansi. Dan harapannya dengan aplikasi Monpela ini tidak mengorbankan kualitas layanan yang profesional namun memberikan nilai tambah untuk kedepannya. Adapun hasil dari

dengan adanya inovasi baru berupa monitoring pelelangan yang di kondisikan sesuai dengan beberapa variabel, seperti kegiatan prioritas, keperintisan, anggaran dll maka saat ini dapat ditampilkan kurang lebih dalam bentuk margin di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Monitoring Pelanggangan SIMONPELA

Sebelum adanya SIMONPELA	Setelah adanya SIMONPELA
<ol style="list-style-type: none"> Belum tersedianya sistim informasi perencanaan tender berdasarkan variabel penting, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> Besaran Jumlah Anggaran Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Strategi Nasional Kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat. Belum terpadunya persiapan perencanaan anggaran dengan persiapan perencanaan tender. 	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya sistem informasi yang dapat memberikan informasi/pemetaan dan pelaksanaan kegiatan tender sehingga dapat dijadikan data yang akurat untuk pengambilan keputusan; Terwujudnya penandatanganan kontrak untuk Kegiatan Prioritas pada bulan Januari, Februari dan Maret 2022; Pendampingan dimulai sejak proses perencanaan/penyusunan anggaran mengikuti jadwal pembahasan mulai dari Pagu Kebutuhan, Pagu Indikatif, dan Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2022.

Sumber: Analisis Peneliti (2022)

Berdasarkan (hasil wawancara dengan Heri Junaedi selaku agen perubahan itu sendiri) disampaikan bahwa seharusnya persiapan perencanaan anggaran dengan persiapan perencanaan tender sebaiknya dilaksanakan secara bersamaan dan terpadu karena keberhasilan perencanaan anggaran serta perencanaan tender dapat mewujudkan proses tender sebelum tahun berjalan, maka didapatkan dengan adanya monpela ini kinerja Biro LPPBMN sebagai pust ataupun ujung tombak dari pengadaan barang/jasa milik negara di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat terakomodir dan dilaksanakan secara efektif, efisien terutama transparan untuk mencapai daya serap pembangunan ekonomi dalam hal moda transportasi.

PENUTUP

Simpulan

Reformasi birokrasi dapat diartikan sebagai suatu perubahan tata kelola pemerintahan kearah yang lebih baik untuk memberikan pelayanan dan informasi yang akurat, tepat dan akuntabel sesuai harapan masyarakat. Salah satu

upaya yang dilakukan pemerintah ialah membuat suatu program inovasi pemanfaatan teknologi dan informasi untuk melaksanakan tugas dan meningkatkan kinerja pegawai Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan, yang terbukti mampu meningkatkan kinerja Biro LPPBMN dengan keterbatasan jumlah SDM yang tersedia.

Peneliti menganalisis pelaksanaan Monitoring Lelang dibuktikan dengan menggunakan indikator keberhasilan inovasi menurut Cook, Matthew dan Irwin yaitu 1) kepemimpinan, dalam pelaksanaan program aplikasi Monpela ini pemimpin membentuk tim khusus agen perubahan agar bisa meningkatkan kinerja pegawai dan merela bisa menyusun variabel yang digunakan dalam proses perencanaan tender hingga monitoring implementasinya, 2) manajemen/organisasi, dengan aplikasi Monpela ini tersedia informasi perencanaan tender kegiatan prioritas sesuai dengan variabel sehingga dapat mengoptimalkan kinerja dan pelaksanaan pekerjaan bisa tepat waktu, 3) manajemen risiko, dalam pelaksanaan Monpela masih menemukan kendala terkait anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia yang belum optimal dan cenderung bagian tertentu meminta tender didahulukan sehingga perlu adanya kesiapan yang lebih dalam pelaksanaan Monpela, 4) kemampuan sumber daya manusia, dalam pelaksanaan Monpela ini agen perubahan melakukan bimbingan dan teknologi dan sosialisasi serta melakukan studi kajian yang mendalam untuk menyiapkan sumber daya manusia agar mampu menjalankan program sesuai yang direncanakan dan 5) pemanfaatan teknologi ini membantu kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan yang akuntabel dan transparan kepada masyarakat.

Dengan adanya penelitian ini untuk peneliti selanjutnya bisa menggunakannya sebagai pengembangan lebih lanjut dengan menggunakan jenis penelitian yang berbeda untuk hasil penelitian yang lebih akurat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, berikut saran yang diberikan agar aplikasi Monpela dapat dijalankan secara optimal dan menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kinerja pegawai Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan dan adanya tindak lanjut dari stakeholder yang bersangkutan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembuatan kebijakan percepatan tender sebelum tahun berjalan berikutnya sehingga untuk meningkatkan jumlah terlaksananya tender untuk mendukung daya serap.
2. Melaksanakan bimbingan teknis kepada KPA, PPK, Pejabat Pengadaan dan PPHP dan POKJA dan pengadaan pelatihan lebih lanjut tentang pelaksanaan aplikasi Monpela.
3. Menyediakan sistem informasi yang dapat memberikan informasi atau pemetaan dan pelaksanaan kegiatan tender sehingga dapat dijadikan data yang akurat untuk pengambilan keputusan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan tender selama satu tahun untuk mengukur tingkat pencapaian dari target yang telah ditetapkan.
5. Memaksimalkan otomatisasi proses penjadwalan sehingga meningkatkan percepatan layanan atau proses tender.
6. Perlu dilaksanakannya kegiatan tender klinik untuk mengidentifikasi kesiapan dokumen tender pada kegiatan prioritas yang dilakukan pada seluruh satker di lingkungan Kementerian Perhubungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, K. A., Duta, S., Surakarta, B., Mikro, K. U., & Umkm, M. (2015). *No Title*. 9(September), 43–54.
- At, S., Kdod, P., & Desentralisasi, K. (2020). *Birokrasi (Studi Kasus Pada Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah) Anti – Bribery Management System ISO 37001 : 2016 and Bureaucratic Reform (Case*. 13–22.
- Dan, B., Industri, R., Smart, M., Faedlulloh, D., Maarif, S., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2020). *Indonesia Bureaucracy And Industrial Revolution 4 . 0 : Preventing The Myth Of Smart Asn In Indonesia ' S Bureaucratic Reform Agenda*. 16(3), 313–336.
- Eprilianto, D. F., Lestari, Y., Megawati, S., & Oktariyanda, T. A. (2021). *Pendampingan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital Sebagai Upaya Adaptasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. 2(3), 767–776.
- Erlina, D. (2016). *Peran Birokrasi Dalam Pengembangan Daerah Guna Mewujudkan Good Governance di Kalimantan Selatan (Kajian Tentang Prinsip Transparansi, Partisipasi, dan Daya Tanggap Pada Dinas Pendidikan dan Rumah Sakit Umum Daerah)*. 1–148.
- Jazuli, A., Penelitian, B., Hukum, K., & Indonesia, R. (2021). *Manusia Dalam Pembangunan Zona Integritas Berkelanjutan (Commitment Agent Of Change Ministry Of Law And Human Rights In Development Of Sustainable Integrity Zone)*. 415–430.
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 105 Tahun 2022 Tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2022
- Perspektif, D., & Publik, A. (2018). *Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik*. 25–37.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014
- Peraturan Presiden Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
- Pratiwi, M. A., Yuwono, T., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). *Analisis Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Good Governance pada Pemerintah Kabupaten Pemalang Implementation of the Regulation of the Head of the Land Analysis of Bureaucratic Reform to Realize Good Governance in Pemalang Regency Government*. 11(3), 1033–1042.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6272>
- Publik, J. A., & Birokrasi, R. (2018). *Tantangan Reformasi Birokrasi berbasis E-Procurement di Indonesia*. 6(2), 9–18.
- Salsabila, F., Ilmu, S., Negara, A., Publik, J. A., Ilmu, F., Prabawati, I., Sos, S., & Si, M. (n.d.). *Inovasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kepolisian Resort (Polres) Kediri*, 3-5.
- Wastuhana, Y., & Werdiningsih, R. (2021). *Reformasi birokrasi era informasi teknologi 1 2. 3*, 8–15.
- Yasa, A., Rafi, M., Rahmanto, F., & Setiawan, D. (2021). *Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5 . 0 di Indonesia Strengthening Bureaucratic Reform Towards Society 5 . 0 Era in Indonesia*. 20(01), 27–42.

